



## **Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial**

**Azzahra Aulia Putri**

*azahraauliaputri37@gmail.com*

Universitas Bandar Lampung

**Chindi Jania**

*chindic763@gmail.com*

Universitas Bandar Lampung

**Salbilla Dwi Andrian**

*salbilladwiandrian9@gmail.com*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,

Lampung 35142, Indonesia. Telepon: (0721) 773847.

Email: *azahraauliaputri37@gmail.com*

***Abstrack.** Corruption is one of the most critical issues that has long been entrenched in many countries, including Indonesia. Corrupt practices not only cause financial losses to the state but also have far-reaching impacts on the economy and the social life of society. This article aims to thoroughly analyze how corruption affects economy stability and social values within the community. The study uses a qualitative descriptive approach through literature review and secondary data from anti-corruption agency reports and scientific publications. The findings indicate that corruption leads to economic inefficiency, hinders investment, increases social inequality and erodes public trust in state institutions. Effort to prevent and eradicate corruption must be carried out systematically, sustainably, and involve all elements of society.*

***Keywords :** corruption, economy, social life, inequality, public trust*

**Abstrak.** Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang telah lama mengakar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana korupsi mempengaruhi stabilitas ekonomi serta nilai-nilai sosial di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari laporan lembaga antikorupsi serta publikasi ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa korupsi menimbulkan inefisiensi ekonomi, menghambat investasi, meningkatkan ketimpangan sosial, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

**Kata Kunci :** Korupsi, Perekonomian, Kehidupan Sosial, Ketimpangan, Kepercayaan Publik.

### **PENDAHULUAN**

Korupsi telah menjadi masalah klasik namun tetap relevan untuk dibahas hingga saat ini. Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling kompleks dan merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya sekadar tindakan penyimpangan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, melainkan telah

menjadi ancaman nyata bagi fondasi ekonomi, stabilitas sosial, serta keadilan dalam masyarakat. Kejahatan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran sudah sangat meresahkan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran merupakan musuh masyarakat yang harus segera diberantas demi lancarnya kemajuan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia berlangsung secara sistematis dan meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>3</sup> Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor pemerintahan, swasta, hingga lembaga pendidikan dan layanan publik. Sjahdeini (2006) menyatakan bahwa perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila tindakan melawan hukum dilakukan oleh pihak yang mewakili atau bekerja untuk perusahaan tersebut<sup>4</sup>. Meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk memberantasnya, korupsi tetap tumbuh dan berkembang, bahkan dalam berbagai bentuk yang semakin canggih dan terselubung.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya.<sup>5</sup> Korupsi telah menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup> Dalam konteks perekonomian, korupsi menyebabkan distorsi alokasi sumber daya, menghambat investasi, dan menurunkan daya saing nasional. Perilaku koruptif yang sistematis menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, sehingga investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial melebar. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum dan ekonomi nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, Sol Justicia 5 (2), 192, 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*.

<sup>2</sup> Zainudin, Hasan. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi*. Universitas Bandar Lampung : Lampung

<sup>3</sup> Adnan, Zainal. 2006. *Korupsi dan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>4</sup> Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

<sup>5</sup> Atmasasmita, Romli. 2004. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

<sup>6</sup> Hiariej, Eddy O. S. 2009. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>7</sup> Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.<sup>8</sup> Akibat korupsi, kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan pribadi dan kelompok elit tertentu. Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat malah menjadi ladang praktik curang, mulai dari penggelembungan anggaran, penyuapan, hingga penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial. Fenomena ini menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara dan menurunkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya.

Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas anak bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi.<sup>9</sup>

Lebih jauh lagi, dampak korupsi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang koruptif, nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sering kali terpinggirkan. Korupsi melahirkan ketimpangan sosial yang tajam, di mana hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekayaan dan kekuasaan, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan hanya berpihak pada mereka yang memiliki uang atau kekuasaan, kepercayaan publik terhadap institusi negara pun mengalami erosi yang signifikan. Masyarakat menjadi apatis, sinis, dan kehilangan harapan terhadap perubahan.

Gatra (2018) menjelaskan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian dengan mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta menurunkan kepercayaan investor.<sup>10</sup> Selain itu, korupsi juga menghambat investasi asing, memperburuk iklim usaha, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Investor tidak akan menanamkan modal di negara yang sistem hukumnya lemah dan proses bisnisnya dibebani oleh pungutan liar atau birokrasi yang korup. Hal ini berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, kurangnya lapangan kerja, dan meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran. Dalam jangka panjang, negara yang gagal mengendalikan korupsi akan terjebak dalam lingkaran stagnasi dan ketidakstabilan sosial yang sulit dipulihkan.

Korupsi juga memperlemah legitimasi pemerintahan. Ketika rakyat menyaksikan pemimpin dan pejabat publik memperkaya diri melalui cara-cara tidak sah, maka muncul krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Ini sangat berbahaya karena

---

<sup>8</sup> Arifin, Syamsul. 2014. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>9</sup> Zainudin Hasan, A Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari *Journal of Accounting Law Communication and Tchnology* 1 (2), 308-315, 2024. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karekter Anak Bangsa* .

<sup>10</sup> Gatra, Didi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

bisa memicu ketidakpuasan sosial, demonstrasi massal, bahkan ancaman disintegrasi. Tidak sedikit negara yang mengalami gejolak politik berkepanjangan akibat kegagalan dalam menangani korupsi secara tegas dan efektif.<sup>11</sup>

Dalam melakukan penelitian hukum terhadap fenomena sosial seperti korupsi, penting untuk memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai norma normatif, tetapi juga berfungsi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendekatan yuridis-sosiologis menjadi penting ketika meneliti dampak korupsi terhadap perekonomian nasional. Korupsi sebagai pelanggaran hukum tidak hanya menimbulkan kerugian negara dari sisi keuangan, tetapi juga mengganggu tatanan ekonomi makro karena melemahkan sistem kelembagaan, menghambat pertumbuhan investasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, hukum harus dilihat bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menciptakan sistem perekonomian yang bersih, transparan, dan akuntabel.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, memahami dampak korupsi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial merupakan langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh dan berdampak nyata. Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam bagaimana korupsi memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mengajak pembaca untuk menyadari betapa pentingnya membangun budaya antikorupsi sejak dini. Dengan pengetahuan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya negara yang adil, sejahtera, dan berintegritas.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana dampak korupsi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat?
2. Mengapa korupsi tetap marak meskipun upaya pemberantasannya telah dilakukan?
3. Apa saja tantangan dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai dampak, penyebab, serta tantangan dalam pemberantasan korupsi berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Peneliti tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan fokus pada analisis isi dari data berupa dokumen, artikel, berita, laporan, dan literatur ilmiah.

---

<sup>11</sup> Muladi. 2005. *Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

1. Sumber Data:

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan, seperti:

- a. Artikel jurnal ilmiah tentang korupsi
  - b. Laporan dari lembaga anti-korupsi (KPK, TI, ICW)
  - c. Berita dari media massaDokumen pemerintah atau undang-undang terkait pemberantasan korupsi
2. Teknik Pengumpulan Data:
- a. Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik korupsi.
  - b. Analisis dokumen, yaitu menganalisis isi dari dokumen resmi, laporan tahunan, serta publikasi dari lembaga terkait.
3. Teknik Analisis Data:
- a. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara reduksi data (memilih informasi yang relevan), penyajian data (disusun secara sistematis), dan penarikan kesimpulan.
  - b. Peneliti akan menghubungkan informasi yang ditemukan dengan teori atau konsep yang ada agar dapat menjawab ketiga rumusan masalah secara logis dan mendalam.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Korupsi terhadap Perekonomian dan Kehidupan Sosial Masyarakat**

Korupsi memberikan dampak yang sangat merusak terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Berikut adalah uraian lengkapnya:

#### **A. Dampak terhadap Perekonomian**

Korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan melemahkan struktur ekonomi nasional. Beberapa dampak ekonomi yang paling signifikan antara lain:

- a. Penghambat Investasi Asing dan Domestik:  
Investor, baik lokal maupun asing, cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena dianggap berisiko tinggi. Biaya-biaya tersembunyi seperti suap dan pungli memperbesar modal usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum.
- b. Meningkatkan Biaya Ekonomi:  
Korupsi menyebabkan pembengkakan anggaran proyek (mark-up) dan penyelewengan dana publik. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi pejabat yang korup. Hal ini mengakibatkan proyek infrastruktur atau layanan publik tidak maksimal dan merugikan rakyat.
- c. Merusak Iklim Usaha dan Persaingan Sehat:  
Perusahaan yang tidak memberikan suap akan kalah bersaing dengan yang menyuap, meskipun dari segi kualitas lebih baik. Ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan mematikan semangat wirausaha jujur.

- d. Menurunkan Pendapatan Negara:  
Korupsi di sektor perpajakan, bea cukai, dan pengadaan barang/jasa menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Pendapatan negara menjadi tidak optimal, sehingga pembangunan dan pelayanan publik terhambat.
  - e. Memperluas Ketimpangan Ekonomi:  
Korupsi membuat kekayaan hanya berputar di kalangan elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Ini memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta memperkuat oligarki ekonomi.
- B. Dampak terhadap Kehidupan Sosial
- Selain ekonomi, korupsi berdampak besar terhadap tatanan sosial dalam masyarakat:
- a. Erosi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah:  
Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merusak kredibilitas institusi negara. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat hukum, pemerintah, bahkan sistem demokrasi itu sendiri.
  - b. Pembentukan Budaya Apatitis dan Sinis:  
Ketika korupsi dianggap biasa dan tidak ada keadilan dalam penegakan hukum, masyarakat cenderung menjadi apatis, tidak peduli, atau bahkan ikut-ikutan melakukan praktik curang.
  - c. Ketimpangan Akses terhadap Layanan Publik:  
Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Masyarakat miskin dan rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena akses mereka terbatas oleh birokrasi yang korup.
  - d. Degradasi Nilai Sosial dan Moral:  
Dalam masyarakat yang terbiasa melihat korupsi, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlahan-lahan memudar. Generasi muda bisa tumbuh dengan persepsi bahwa sukses hanya bisa diraih melalui jalan pintas dan koneksi.

## **2. Mengapa Korupsi Tetap Marak Meskipun Upaya Pemberantasannya Telah Dilakukan**

Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, termasuk dalam sektor ekonomi. Praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya, menghambat investasi, dan menurunkan efisiensi ekonomi.

Ketika integritas moral aparatur negara melemah, keputusan-keputusan ekonomi yang seharusnya didasarkan pada prinsip kepentingan publik berubah menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim usaha, menurunkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan

korupsi harus diiringi dengan penguatan integritas moral aparaturnegara sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.<sup>13</sup>

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Namun, praktik ini masih terus berkembang. Penyebab utamanya antara lain:

a. Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tebang pilih membuat pelaku korupsi tidak merasa takut. Hukuman yang ringan, vonis yang tidak menimbulkan efek jera, serta intervensi politik dalam proses hukum menjadi penghambat utama pemberantasan korupsi.

b. Kurangnya Integritas Aparat

Tidak sedikit aparat penegak hukum dan pengawas pemerintahan yang justru terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana pengawas dan yang diawasi sama-sama korup.

c. Budaya Koruptif yang Mengakar

Korupsi sudah menjadi kebiasaan di berbagai sektor dan tingkatan, dari elit hingga birokrat bawah. Praktik seperti pungutan liar, gratifikasi, atau nepotisme sering dianggap hal biasa, bahkan sudah menjadi budaya yang diwariskan.

d. Kontrol Sosial yang Lemah

Masyarakat belum sepenuhnya kritis terhadap korupsi. Banyak kasus yang tidak terungkap karena tidak ada keberanian untuk melapor, takut akan ancaman, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti.

e. Celah dalam Sistem Pemerintahan dan Birokrasi

Sistem yang tidak transparan dan terlalu birokratis membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Kurangnya digitalisasi dan keterbukaan data membuat korupsi sulit dilacak.

### **3. Tantangan dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Masyarakat**

Membangun budaya antikorupsi bukanlah tugas mudah karena harus mengubah pola pikir, kebiasaan, dan nilai-nilai sosial yang telah terbentuk lama. Beberapa tantangannya antara lain:

a. Kurangnya Pendidikan Karakter Sejak Dini

Pendidikan antikorupsi masih belum menjadi bagian utama dari sistem pendidikan formal. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas belum diajarkan secara konsisten dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

b. Minimnya Keteladanan dari Pemimpin

---

<sup>13</sup>Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia.

Pemimpin yang seharusnya menjadi contoh justru sering terlibat dalam kasus korupsi. Ketika pejabat tinggi tidak menunjukkan integritas, masyarakat pun enggan untuk mengikuti nilai-nilai antikorupsi.

c. Ketidakpercayaan terhadap Sistem

Masyarakat sering kali skeptis terhadap program antikorupsi karena tidak melihat hasil nyata. Ini menyebabkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan korupsi menjadi rendah.

d. Media dan Sosial Media yang Tidak Edukatif

Alih-alih mengedukasi, banyak media yang justru menyajikan konten sensasional atau tidak mendidik. Konten yang menormalisasi gaya hidup mewah tanpa menjelaskan sumber kekayaannya dapat mendorong mentalitas instan dan konsumtif.

e. Kurangnya Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower)

Orang yang melaporkan korupsi sering mendapatkan ancaman atau intimidasi. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, orang akan takut untuk melapor atau bersikap kritis.

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang memberikan dampak luas dan serius terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam aspek ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan melalui praktik-praktik seperti penyalahgunaan anggaran, suap, dan penggelembungan biaya proyek. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas pembangunan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, menurunkan minat investasi, memperbesar ketimpangan ekonomi, serta menyebabkan kebocoran pendapatan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dari sisi sosial, korupsi memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara dan aparat penegak hukum. Ia melahirkan masyarakat yang apatis, sinis, dan permisif terhadap tindakan tidak bermoral, yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, pun semakin memperparah ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, praktik ini tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti lemahnya penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera, minimnya integritas di kalangan penegak hukum dan pejabat publik, budaya koruptif yang sudah mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat, serta celah dalam sistem birokrasi dan kurangnya kontrol sosial. Selain itu, belum maksimalnya perlindungan terhadap pelapor korupsi juga menjadi faktor yang menghambat pengungkapan kasus korupsi secara luas. Membangun budaya antikorupsi menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, yang menyebabkan generasi muda tidak memiliki fondasi moral yang kuat. Keteladanan dari para pemimpin yang buruk, rendahnya kepercayaan

masyarakat terhadap sistem hukum, media yang tidak edukatif, serta ketiadaan perlindungan terhadap pelapor turut memperbesar tantangan tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus disertai dengan reformasi budaya, pendidikan, dan sistem birokrasi secara menyeluruh. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung gerakan antikorupsi, baik melalui pendidikan, pengawasan, pelaporan, maupun membangun lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Hanya dengan komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa, cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi dapat terwujud.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, Zainal. 2006. *Korupsi dan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sjahdeini.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Arifin, Syamsul. 2014. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Mahrus. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatra, Didi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O. S. 2009. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2005. *Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Eliyawati. 2017. *Korupsi dan Integritas Moral Aparatur Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Sutan Remy. 2006. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainudin Hasan, A Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari Journal of Accounting Law Communication and Tchnology 1 (2), 308-315, 2024. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa* .
- Zainudin Hasan, Sol Justicia 5 (2), 192, 2022. *Tinjauan Kriminalogi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*.
- Zainudin, Hasan.2025. *Pendidikan Anti Korupsi*.Universitas Bandar Lampung : Lampung